

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan paling krusial yang mungkin tidak ada hentinya ditanggung oleh negara adalah kemiskinan. Dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia (BPS, 2025), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapati banyaknya kasus kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengupayakan cara agar mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana individu maupun sekelompok orang kurang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yakni sandang, pangan, dan papan. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan keprihatinan dari pemerintah, karena sandang dan pangan merupakan kebutuhan pokok yang paling utama dibutuhkan manusia.

Masalah pangan menjadi suatu masalah yang sangat mendasar bagi suatu negara di karenakan pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pemerintah negara memiliki peran yang begitu besar untuk memastikan ketersediaan pangan terhadap seluruh rakyatnya dan hal tersebut yang mendasari terbitnya UU tentang pangan yakni UU No. 7/1996 (UU Pangan, No. 7 Tahun 1996). Pemerintah sebagai perwakilan masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyejahterakan rakyatnya, fungsi pemerintah salah satunya adalah fungsi sekunder yang didalamnya ada fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Dari berbagai fungsi tersebut ada upaya pemerintah yaitu menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang di dalam

program tersebut ada berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program-program tersebut, seperti masalah pangan yang merupakan kebutuhan utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat sehingga menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga sosial yang beraktivitas atau yang berperan penting dalam mencegah pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakat. Definisi kesejahteraan sosial tentunya sangatlah beragam, namun pada intinya seluruh definisi kesejahteraan sosial tersebut merujuk pada keberfungsian sosial yang terjadi dalam upaya untuk dapat meningkatkan kebutuhan dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi Body of knowledge (pengetahuan), Body of skill (keterampilan), dan Body of value (nilai) dan salah satu definisi yang juga tidaklah jauh berbeda dengan definisi kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan di atas adalah definisi kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang diperbaharui dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 yang dikutip oleh Fahrudin (2014) Menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Seiring dengan berjalanya waktu, semakin banyak muncul beragam masalah-masalah kesejahteraan sosial. Masalah sosial sendiri adalah terdapat kondisi yang dirasakan banyak orang secara tidak menyenangkan yang menuntut

adanya pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. sedangkan menurut Soekanto (2012) mengatakan bahwa Masalah sosial merupakan “suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kelompok sosial”. Berbagai macam definisi terkait masalah sosial di atas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial merupakan kondisi atau situasi yang dirasa oleh banyak orang dimana harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. perkembangan masalah sosial semakin meningkat, bertambah kompleks dan meluas melalui berbagai sisi kehidupan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun yang ada di desa. Masalah sosial dapat menghambat keberfungsian sosial individu, keluarga atau kelompok maupun masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar baik secara fisik, psikiatrik dan ekonomi dari masalah sosial dapat berujung pada permasalahan kemiskinan dan dimana setiap individu memiliki akses fisik dan ekonomi untuk memperoleh makanan bergizi yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketahanan pangan juga tidak mencakup ketersediaan pangan secara nasional, tetapi juga melibatkan distribusi dan aksesibilitas bagi setiap keluarga, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan masyarakat berpenghasilan rendah, oleh karena itu persoalan pangan kerap dihadapkan pada masalah ketidakmerataan distribusi dan keterbatasan daya beli terutama di kalangan masyarakat miskin (Wardani et al., 2020).

Indonesia yang masuk ke dalam kategori negara berkembang, masih banyak didapati daerah-daerah yang termasuk daerah miskin atau tertinggal dan dapat dipastikan daerah tersebut ditinggali masyarakat dengan kategori miskin atau kurang mampu. Seiring perkembangan zaman dengan pergolakan ekonomi yang

terus meningkat mengakibatkan semakin bertambahnya beban kehidupan yang dirasakan bagi masyarakat yang tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan Indonesia sudah dilakukan dan akan terus dilakukan.

Data kemiskinan berdasarkan hasil sensus menurut Badan Pusat Statistik BPS (2024) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen setara dengan 25,22 juta orang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor dan jarang kemiskinan disebabkan hanya karena satu faktor tunggal. Beberapa faktor penyebab kemiskinan yang saling berkaitan seperti tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk memulai usaha, terkena pemutusan hubungan kerja (PKH), kurangnya kesempatan atau peluang kerja, tidak adanya jaminan sosial dan kurangnya pelayanan sosial yang memadai, serta aksesibilitas atau infrastruktur yang terbatas.

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia juga tak luput dari permasalahan mendasar ini, yaitu permasalahan kemiskinan yang mana telah disebutkan di atas bahwa hampir seluruh provinsi maupun kota yang ada di Indonesia pasti terdapat permasalahan kemiskinan. Badan Pusat Statistik BPS (2024) pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu sekitar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Kondisi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan gambaran masyarakat miskin di Indonesia dimana jumlahnya dapat dikatakan naik turun secara fluktuatif dari tahun ke tahun.

Permasalahan kemiskinan tersebut jika dikerucutkan juga terjadi di Kota Bekasi dapat disebut sebagai salah satu kota metropolitan yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta. Dinas Kota Bekasi menyebutkan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi mencapai 900 ribu orang. Angka tersebut merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Kemiskinan yang ada di Kota Bekasi dikarenakan terjadinya penurunan tenaga kerja di sektor industri. Tercatat pula pada data Penerima Bantuan Program Sembako tahun 2024 di Kota Bekasi terdapat 57.179 KK yang menjadi peserta penerima Program Sembako, sedangkan di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih sendiri terdapat 757 Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako.

Melihat berbagai realita mengenai permasalahan kemiskinan yang terjadi serta masih terdapat banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, pemerintah tidak serta merta diam melihat realitas kemiskinan yang ada. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Program jaminan serta perlindungan bagi masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran dan memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan angka dan memutus rantai kemiskinan, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin dengan memberikan bantuan Program Sembako yang dimana bisa memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat.

Terdapat salah satu program yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir yakni Program Sembako. Program sembako ini merupakan perubahan bentuk dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pangan yang lebih berkualitas dan bergizi, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Sembako merupakan program penanggulangan kemiskinan dan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam melaksanakan kebutuhan pangan serta memberikan nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat, Program Sembako ini diberikan pemerintah sebagaimana keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan (kabupaten/kota) sesuai alokasi yang disediakan Pemerintah, dan namanya termasuk dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Daftar Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako tersebut bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan beban masyarakat dalam melaksanakan kebutuhan pokok, pemerintah telah menerapkan kebijakan program sosial yang dimana program ini di tetapkan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi yang seimbang kepada keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran, tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan Program Sembako.

Program Sembako sendiri merupakan pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli Keluarga Penerima Manfaat yaitu

sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral. Perluasan jenis komoditas bahan pangan ini dapat dibeli Keluarga Penerima Manfaat di e-warong yang merupakan upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses kepada Keluarga Penerima Manfaat terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi yang beragam dan sebagai upaya untuk mencegah stunting. Program Sembako ini diharapkan dapat memberikan pilihan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam menentukan jenis kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan itu sendiri. Atas berbagai perubahan yang terjadi pada Program Sembako tersebut diharapkan Keluarga Penerima manfaat bisa dengan leluasa untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, bantuan sosial pangan dalam bentuk tunai dari pemerintah sendiri melalui bank memberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulanya yaitu Rp 200.000/ KK.

Program Sembako diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pemerintah mengurangi beban masyarakat miskin dan mendukung pemenuhan nutrisi bagi Keluarga Miskin. Dampak ini tercermin dalam peningkatan ketahanan pangan keluarga yang menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif dengan Implementasi program.

Penelitian ditempatkan dalam peta keilmuan yang berfokus pada bidang kebijakan publik, administrasi publik, dan kesejahteraan sosial. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas topik yang serupa, seperti penelitian oleh Usrotul Hasanah dan Yeni Febriyana Putri (2021) berjudul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Prajekan Lor Kabupaten Bondowoso. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pelaksanaan program BLT Dana Desa serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin terdampak pandemi, namun masih terdapat keterlambatan sekitar satu bulan dari jadwal yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adek Safitri (2020) berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program BPNT di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai pedoman umum, tetapi masih ditemukan kendala seperti keterlambatan distribusi bantuan dan kurangnya pemahaman sebagian penerima manfaat terhadap mekanisme program.

Penelitian yang dilakukan oleh Refendy Paat, Sofia Pangemanan, dan Fras Pangemana (2021) berjudul Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyaluran BLT Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan telah tepat waktu dan sesuai prosedur, meskipun masih ditemukan kendala pada proses pendataan penerima manfaat.

Perbedaan utama antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa poin. Dari segi lokasi, penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kampar

dan Kabupaten Minahasa Selatan. Dari segi objek dan fokus kajian, penelitian ini secara khusus membahas implementasi Program Sembako sebagai salah satu bentuk bantuan sosial pangan pemerintah, sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi BLT Dana Desa, BPNT, atau efektivitas Program Keluarga Harapan. Perbedaan konteks wilayah penelitian yang berada di daerah perkotaan dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai pelaksanaan program bantuan sosial.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan Implementasi Program Sembako di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Ketertarikan peneliti didasari oleh adanya permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan penyaluran, pendataan penerima manfaat yang belum optimal, serta adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dari masyarakat terkait mekanisme program. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Sembako di wilayah tersebut, sekaligus memberikan gambaran yang lebih mendalam yang memengaruhi keberhasilan implementasinya di Wilayah Kelurahan Jatisari, Kota Bekasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di kemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Bantuan Program Sembako Pada Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya fokus masalah tersebut maka dijabarkan sub-sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana Pemahaman informan dari Program Sembako di Kelurahan Jatisari?
3. Bagaimana ketepatan Sasaran program Sembako di Kelurahan Jatisari?
4. Bagaimana ketepatan waktu Program Sembako di Kelurahan Jatisari?
5. Bagaimana tercapainya tujuan Program Sembako di Kelurahan Jatisari?
6. Bagaimana perubahan nyata dari Program Sembako di Kelurahan Jatisari?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum adalah untuk mengkaji tentang “implementasi Program Sembako di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam tentang :

1. Karakteristik Responden
2. Pemahaman Program Sembako
3. Ketepatan sasaran Program Sembako
4. Ketepatan waktu Program Sembako
5. Ketepatan tujuan Program Sembako
6. Perubahan nyata Program Sembako

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dalam memperkaya konsep dan praktik pekerja sosial terutama pada bidang kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah tentang Implementasi Program Sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat dan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan tentang Implementasi, kajian konseptual tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN memuat desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validasi dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN